

***THE FALL OF SAWAHLUNTO***  
**(Studi tentang Pengaruh Gejolak Ekonomi-Politik Global  
terhadap Perkembangan sebuah Kota Lokal, 1930-1940an)**

**DEDI ARSA**

Sejarah Islam

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Email: *deddyarsya1987@gmail.com*

Abstract

Sawahlunto is a mining town that enjoyed the glory due to coal exploitation by the Dutch colonial government which began in the 1880s. But in the early 1930s to the end of the 1940s, triggered by successive world economic crises (malaise) and various political upheavals during and some time after the Pacific War, this city has experienced a number of long downturns. This paper looks at the effect of economic decline and political turmoil on a city, in this case the City of Sawahlunto as a mining city. Using modern historical methods (historiography, interpretation, interpretation and writing), with an approach to the history of the city, this article reveals several things: First, in the 1930s, due to the world's crisis, coal production was dimming, this caused no new development of the city. Second, in 1942 the Pacific War took place, Japan ruled over the mining company, and Sawahlunto became worse off. Third, after Indonesia gained its independence until the end of the 1960s, Sawahlunto did not receive significant improvements, except for a few rebuilt infrastructures. Thus, economic sluggishness and political riot at the global [and national] level have had a direct influence on a city at the local level.

Keyword: Sawahlunto, Malaise, Pacific War, City History

*Abstrak*

*Sawahlunto adalah kota tambang yang menikmati kejayaan akibat eksploitasi batubara oleh pemerintah kolonial Belanda yang dimulai 1880an. Tetapi pada awal tahun 1930an hingga akhir 1940an, dipicu berturut-turut oleh krisis ekonomi dunia (malaise) dan berbagai gejolak politik selama dan beberapa waktu setelah Perang Pasifik, telah menyebabkan kota ini beberapa kali mengalami kemunduran/kelesuan yang cukup panjang. Tulisan ini melihat pengaruh kemerosotan ekonomi dan gejolak politik terhadap sebuah kota, dalam hal ini Kota Sawahlunto sebagai kota*

*tambang. Menggunakan metode sejarah modern (heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan historiografi), dengan pendekatan sejarah kota, tulisan ini mendedahkan beberapa hal: Pertama, pada 1930an, akibat krisis dunia, produksi batubara meredup, ini menyebabkan tidak ada pembangunan baru atas kota. Kedua, pada 1942 Perang Pasifik terjadi, Jepang berkuasa atas perusahaan tambang, dan Sawahlunto menjadi semakin terpuruk. Ketiga, setelah Indonesia merdeka hingga akhir 1960an, Sawahlunto tidak mendapat perbaikan yang berarti, kecuali sedikit infrastruktur yang dibangun ulang. Jadi, kelesuan ekonomi dan huruhara politik di tingkat global [dan nasional] telah berpengaruh langsung bagi sebuah kota di tingkat lokal.*

Keyword: Sawahlunto, Malaise, Perang Pasifik, Sejarah Kota

## PENDAHULUAN

Selama rentang awal 1930an sampai dengan akhir 1940an, Kota Sawahlunto mengalami kelesuan yang tidak pernah terjadi sejak kota itu berdiri pada dua dekade akhir abad ke-19. Berbagai hal disinyalir sebagai penyebabnya, terutama terkait dengan gejala global yang melanda dunia. Depresi ekonomi akibat krisis ekonomi dunia pada 1930an, diikuti oleh gejala politik akibat Perang Pasifik yang terjadi sepanjang periode 1940an adalah beberapa hal yang mengakibatkan produksi batubara menurun, yang berimplikasi langsung kepada pertumbuhan Sawahlunto sebagai sebuah kota. Ketika membicarakan Sawahlunto, sulit memang untuk pada saat yang sama tidak membicarakan dunia tambang; keduanya seolah dua sisi pada satu kepingan uang logam. Dapat dikatakan, ketika aktivitas tambang meredup oleh berbagai gejala di atas, perkembangan kota itu juga meredup.

Kota ini sendiri bermula hadir akibat penemuan batubara dan eksploitasinya oleh pemerintah kolonial. Penemuan batubara pada akhir abad ke-19 telah menyulap lembah sempit yang kurang penting di pedalaman Minangkabau itu menjadi kota yang diperhitungkan, menjadi buah bibir di

seantero Hindia Timur dan bahkan di Negeri Induk. Batubara sendiri adalah komoditas yang paling dibutuhkan di zaman mesin uap. Kisah penemuannya berawal dari dua orang insinyur Belanda. Insinyur yang pertama, C. de Groot, menyusuri Singkarak pada pertengahan abad ke-19, dan menemukan batubara di timur Singkarak pada 1851, yang jumlahnya diperkirakan akan ditemukan jauh lebih banyak jika ditelusuri lebih jauh ke pedalaman. Hampir dua dekade setelah itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengutus W.H. de Grave untuk membawa sebuah ekspedisi ke pinggir Minangkabau itu. Grave tampak berakit-rakit di Sungai Ombilin pada 1868.<sup>1</sup> Geolog muda Belanda itu, menemukan lapisan batu bara di Ulu Aie, lembah gunung yang tidak berpenghuni di daerah aliran Batang

<sup>1</sup> R. A. van Sandick, "Het laatsche hoofdstuk van de Ombilin-guestie", *De Indische Gids*, Amsterdam, 14 Jrg (1892); Suribidari, "Buruh Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto Periode Kolonial 1892-1930", Skripsi (S1), (Padang: Fakultas Sastra Unand, 1994); Carin van Empel, "Dark mine. Labour conditionsof coolies in the State coal mines of West Sumatra", dalam Vincent J. H. Houben, J. Thomas Linblad, dkk. *Coolie Labour in Colonial Indonesia. A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*, (Wiesbaden: Harrassowitz, 1999), h. 179

Ombilin.<sup>2</sup> Hasil hipotesa de Grave, yang dipublikasikannya pada tahun 1871 dengan judul "Het Ombilien-kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en het Transportstelsel op Sumatra's Westkust" itu,<sup>3</sup> menggembirakan sekaligus mencengangkan: ratusan juta ton emas hitam bersemayam di bumi Sawahlunto.

Berdasarkan penelitian de Grave, pemerintah Belanda menjadi yakin batubara di sekitar Sawahlunto sangat menguntungkan untuk dieksploitasi. Apalagi, hasil penelitian de Groot dan de Greve itu diperkuat lagi oleh laporan P. van Diest satu tahun kemudian tentang kualitas batubara Ombilin yang tinggi.<sup>4</sup> Penyelidikan dilanjutkan kemudian dengan lebih intensif oleh pemerintah kolonial, kali ini dilakukan oleh R.D.M. Verbeek pada 1875, yang dari ekspedisinya menyimpulkan bahwa terdapat cadangan batubara sebanyak 205 ton di bawah tanah yang tersebar di Sungai Durian, Sigakut, Lapangan Sugar, Tanah Hitam, dan Perambahan-seluruh kawasan yang menjadi bagian dari Kota Sawahlunto kemudian.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Erwiza Erman, *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatra Barat (1892—1996)*. (Depok, Desantara: 2005), h. 29; Elsa Putri E. Syafril, *Menggali Bara, Menemu Bahasa: Bahasa Tansi, Bahasa Kreol Buruh dari Sawahlunto* (Yogyakarta: Pemerintah Kota Sawahlunto, 2011)

<sup>3</sup> Widjaja Martokusumo, "The Ex-Coal Mining City of Sawahlunto Revisited: Notions on Revitalization, Conservation and Urban Development", Makalah, dalam Seminar on Recent of Research Works at the School of Architecture, Planning and Policy Development ITB, Bandung, 17 April 2008

<sup>4</sup> Andi Asoka dkk., *Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok. Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*, (Padang: Pusat Studi Humaniora Unand, 2005), h. 9-10; Zaiyardam Zubir, "Orang Rantai, Orang Tambang, dan Orang Lobang: Studi tentang Eksploitasi Buruh Tambang Batu Bara Ombilin" dalam Edy S, Ekawati & Susanto Zuchri (Editor), *Arung Samudra: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A. B. Lopian*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Budaya UI Jakarta, 2001).

<sup>5</sup> Widjaja Martokusumo, "The Ex-Coal Mining City of Sawahlunto Revisited...", h. 107-

Untuk memulai eksploitasi, kawasan yang nyaris seluruhnya merupakan tanah ulayat milik nagari-nagari setempat harus dibebaskan terlebih dahulu; pemerintah kolonial Belanda membujuk pemuka-pemuka setempat untuk merelakan tanahnya ditambang. Pada tanggal 1 Juli 1886, sebagian tanah ulayat Nagari Kubang telah diserahkan dengan sebuah perjanjian kepada Perusahaan Tambang Batubara Ombilin milik pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan begitu, daerah itu secara resmi diserahterimakan untuk dijadikan areal pertambangan batubara. Serah terima itu didasarkan kepada atas Akte Notaris yang dikeluarkan oleh E.L. van Rouvery selaku Asisten Residen Tanah Datar, Djaar Sutan Pamuncak sebagai kepala Laras Silungkang, dan penerimanya adalah Hendrik Yakobus Shuuring yang memegang konsesi pertambangan batubara pertama dari pemerintah kolonial Belanda.

*Aneka Minang* tentang ini menulis: "Demikianlah maka pada 1 Juli 1886 ditandatangani konsesi pertama antara Kolonial Belanda yang diwakili oleh Hendrik Jacobus Pilter dengan pihak Bumiputera yang diwakili oleh Laras Silungkang Djaar St. Pandtjak. Yaitu berhak untuk melakukan explorasi dan eksploitasi Tambang Batu Bara di Sawah Lunto".<sup>6</sup> Lalu, pada 10 Januari 1891, melalui surat Gubernur Jenderal No. 186 pemerintah kolonial kembali berhasil mengambil alih tanah ulayat tiga nagari: Kolok, Sijantang, dan sebagian di

---

8; Perinciannya sebagai berikut: Perambahan 20 juta ton, Sigalut 80 juta ton, Sungai Durian 93 juta ton, di barat Lurah Gadang 12 juta ton, dan Lembah Segarbelum diketahui jumlahnya, mengenai ini lihat: Erwiza Erman, *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatra Barat, 1892-1996*, (Depok: Desantara, 2005)

<sup>6</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

Kubang.<sup>7</sup> Pada 1891, untuk pertama kalinya penambangan batubara dilakukan di Sungai Durian. Usaha penambangan itu membuahkan hasil setahun kemudian, pada 1892, dengan produksi sebanyak 47.833 ton batubara.<sup>8</sup>

Sampai tahun 1930, 600.000 ton batubara telah dikeruk dari Sawahlunto-jumlah yang dapat memenuhi 90% kebutuhan energi di Hindia Belanda.<sup>9</sup> Pada ketika itu, Angkatan Laut Belanda membutuhkan batubara dalam jumlah besar untuk memperluas kontrol politiknya di daerah-daerah luar Jawa, terutama di Aceh yang saat itu Belanda sedang sibuk-sibuknya menaklukkan kawasan paling ujung pulau Sumatra itu.<sup>10</sup> Selain untuk memenuhi kebutuhan militer, batubara juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan negara yang besar seperti perusahaan perkapalan K.P.M. (yang memang menggunakan kapal-kapal uap) dan perusahaan perkereta-apian. Tidak ayal lagi, batubara merupakan komoditas penting ketika itu, dan Sawahlunto sebagai rahim yang mengandung kekayaan tersebut dengan begitu juga menjadi kota yang tumbuh seiring dengan geliat emas hitam itu.

Kawasan ini berkembang menjadi kota yang ramai setelah penemuan dan eksploitasi batubara oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1887, diperkirakan Sawahlunto mulai menjadi daerah permukiman, ketika Belanda dengan berani menanamkan modal sebesar 5,5

juta gulden untuk merealisasikan konsensi tambang batubara dan membangun berbagai fasilitas untuk pengusaha tambang. Permukiman ini terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.<sup>11</sup> Untuk memenuhi berbagai kebutuhan eksploitasi penambangan, berbagai infrastruktur dan fasilitas dikembangkan di kota ini. Dapat dikatakan, penambangan batubara di Sawahlunto telah mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas kota itu. Untuk memperlancar pengiriman batubara ke luar Sumatera Barat, misalnya, Belanda mulai membangun Pelabuhan Teluk Bayur di Padang pada tahun 1883 dan dirampungkan pada 1892.

Kemudian untuk menghubungkan Sawahlunto dengan Teluk Bayur yang berjarak 95 kilometer itu, pemerintah kolonial juga membangun jaringan kereta api yang semula baru dapat terealisasikan dari Pulau Air di Padang hingga Muaro Kalaban saja pada 1887. Sementara dari Muaro Kalaban ke Sawahlunto masih belum terhubung dengan jalur kereta api. Jaringan kereta api dari Sawahlunto-Muara Kalaban baru selesai dibangun pada tahun 1894. Maka rentang waktu antara 1892-1894 batubara dibawa dengan kuda beban dan pedati dari Sawahlunto ke Muaro Kalaban yang berjarak 5 km. Hal ini disebabkan oleh topografi Sawahlunto yang dilingkari perbukitan terjal sulit ditembus dari arah timur laut maupun tenggara. Menyiasati ini pemerintah kolonial kemudian membangun terowongan sepanjang 828 meter dari Muaro Kalaban sampai ke jantung Sawahlunto yang rampung dikerjakan pada tahun 1894. Kemudian, jalur kereta api juga dibangun sampai ke pedalaman daerah-daerah Sumatera Barat lainnya, seperti Sijunjung,

<sup>7</sup> Lihat Zaiyardam Zubir, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai. Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-1927*, (Padang: Andalas University Press, 2006)

<sup>8</sup> "De exploitatie den Ombilinkolen", *De Indische Gids*, Amsterdam, 6 Jrg (1894); Yonni Saputra, *Jejak de Greve dalam Kenangan Sawahlunto*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 59

<sup>9</sup> Carin van Empel, "Dark mine. Labour conditionsof coolies... h. 179

<sup>10</sup> Erwiza Erman, dkk. *Orang Rantai. Dari Penjara ke Penjara*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 43

<sup>11</sup> Hanif Nawanir, "Studi Pengembangan Ekonomi dan Keruangan...", h. 65

Bukittinggi, dan Payakumbuh.<sup>12</sup> Kota-kota penting kawasan ini telah terhubung sama sekali oleh jalur kereta api yang menjalar bagai ular bahkan ke kampung-kampung pedalaman. Setelah itu, Sawahlunto semakin mudah diakses dari arah manapun juga.

Proyek tambang batubara telah berdampak luas, tidak hanya terhadap pembangunan fasilitas dan infrastruktur transportasi tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan sektor lain seperti ekonomi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pertambangan itu sendiri, yang menjadikan Sawahlunto menjadi sebuah kota yang diperhitungkan di pedalaman Sumatera pada kurun tersebut. Pada awal abad ke-20, Sawahlunto telah menjadi kota tambang dengan berbagai elemen yang membentuknya. Pemerintah kolonial Belanda merancang dan merencanakan pola perkotaan atas tiga bagian, yaitu Kota Sawahlunto yang merupakan pusat pelayanan kegiatan tambang dan permukiman para administrator, profesioal, dan pimpinan perusahaan; permukiman buruh tambang di Kampung Surian; dan tempat penyekapan pekerja paksa (orang rantai) di Sungai Durian. Sebagai pusat pelayanan tambang dan bermukim kalangan atas pegawai tambang, Sawahlunto dirancang sebagaimana layaknya suatu kota. Hanif Nawawir dalam sebuah studi mengenai pengembangan Kota Sawahlunto menulis:

Jaringan jalan, penataan bangunan, *open space*, sistem *drainase* dan sanitasi disiapkan dan ditata dengan memperhatikan kaidah tata kota yang layak untuk ditinggali. Sungai Batang

Lunto yang membelah kota dibuat menjadi kanal kota dengan tebing dibangun dari tembok penahan dan diapit jalan. Dasar kanal dibuat bertangga dengan bendung kecil, sehingga arus sungai dapat terkendali.<sup>13</sup>

Perkembangan Kota Sawahlunto yang pesat pada periode ini disebabkan karena kota itu menjadi tempat tinggal administrator dan profesional Belanda yang berjumlah hampir seribu orang. Status sosial yang tinggi dari penghuni kota ini telah mampu mendorong tumbuhnya berbagai fasilitas pelayanan kota yang memadai dan bahkan mewah untuk ukuran zamannya. Terdapat kawasan pertambangan, kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, kawasan administrasi pemerintahan dengan segala perangkat fasilitas penunjangnya. Pada 1910, pemerintah kolonial membangun Pasar *Loods* (Pasar Los) di mana bagian selatan dari pasar ini diperuntukkan bagi pedagang tradisional sementara bagian utaranya merupakan pusat pertokoan yang didominasi oleh etnis Tionghoa—sehingga kawasan ini kemudian juga dinamakan Kampung Cina. Pada utara kota itu, terdapat pusat perkantoran perusahaan tambang batubara yang dibangun pada 1916 dengan nama *Ombilinmijnen*, di mana terdapat bangunan bengkel besar, gedung transportasi, gudang besar, pusat telekomunikasi, bangunan tempat penimbunan, penyaringan dan pengolahan batubara, silo (*cilo*), dapur umum atau Gudang Ransoem. Lokasi permukiman terdapat di pinggiran Sungai Lunto, di mana terdapat perumahan buruh dan pejabat tambang.

Perkembangan kota ini berlanjut di tahun-tahun setelah itu. Pada tahun 1897, sebuah penjara yang diperuntukkan bagi narapidana hukuman berat yang akan dipekerjapaksakan di tambang-tambang batubara yang baru dibuka, juga telah

<sup>12</sup> Freek Colombijn, “Perkembangan Jaringan Transportasi di Sumatera Barat dari Masa Parkolonial sampai Sekarang”, dalam J. Thomas Lindbald (editor) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 368; Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h.76

<sup>13</sup> Hanif Nawawir, “Studi Pengembangan Ekonomi dan Keruangan...”, h. 70-71

rampung dibangun di Sungai Durian.<sup>14</sup> Pembangunan penjara ini kemudian juga diikuti oleh pembangunan tangsi-tangsi untuk para kuli. Perumahan buruh rantai (orang hukuman yang dipekerjakan) dan buruh kontrak berada di Tangsi Rantai, sementara perumahan karyawan berlokasi di Tangsi Baru. Lalu pada periode yang sama pemerintah kolonial membangun perumahan untuk pejabat-pejabat tambang seperti Rumah Kepala Tambang, Rumah Insinyur Tambang, dan Rumah Pengawas Tambang. Di bagian lain kota, pada awal abad ke-20 telah berdiri rumah dinas Asisten Residen, rumah dinas Ketua Kejaksaan, dan rumah dinas Ketua Pengadilan. Pada 1915, rumah sakit *Ombilin* (*Ombilinjnen-Hospitaal*) yang telah ada sejak 1894, direnovasi menjadi lebih besar dan luas.

Hingga paro pertama abad ke-20, pamor Sawahlunto telah jauh naik melampaui kota-kota yang dulunya penting dalam sejarah Sumatera Barat, bahkan semisal *Fort van der Capellen* atau Batusangkar yang pernah menjadi basis penting pemerintah kolonial Belanda pada paro pertama abad ke-19. Padara Harahap misalnya melaporkan pada tahun 1927, "... semendjak Sawah Loento mendjadi kota tambang, semangkin kalah kelihatan Batoe Sangkar...."<sup>15</sup> Lahirlah kota yang disebut "Belanda Kecil" oleh banyak kalangan. Daerah perdalaman yang dulu terisolir itu kemudian banyak didatangi oleh orang luar dari berbagai etnis yang nyaris seluruhnya bekerja pada perusahaan batubara milik pemerintah kolonial. Orang-orang kulit putih menikmati puncak hirarkisnya di perusahaan tambang tetapi juga dalam kehidupan sosialnya atas kota itu. Tentang yang disebutkan terakhir,

<sup>14</sup> Deddy Arsyah, "Penjara di Padang, 1824-1942", Tesis (S2), Pascasarjana Universitas Andalas: Ilmu Sejarah, 2012

<sup>15</sup> Parada Harahap, *Dari Pantai ke Pantai. Pedjalanan ke Soematra*, (Weltevraeven: Bintang Hindia, 1926) h. 111

Susan Rodgers menulis bahwa Belanda-Sawahlunto menempati posisi elit bahkan di antara orang-orang Belanda sendiri di tanah jajahan. Pada 1930, orang Belanda yang tinggal di Sawahlunto telah "menciptakan kepatutan sosial tertentu di kalangan mereka sendiri, hal ini tercermin dalam pernikahan mereka di gereja, sekolah top untuk anak-anak, dan dalam gosip yang sedang berlangsung tentang kepemilikan pembantu dari kalangan pribumi, sopir, dan koki, serta praktik kehidupan mewah Eropa lainnya yang tepat di daerah tropis."<sup>16</sup>

Selanjutnya, Rodgers menulis, dengan mengutip memoir Gerdy Ungerer, seorang Indo-Belanda yang menghabiskan masa kanak-kanak di kota itu, bahwa keluarga-keluarga Belanda dan Indo-Belanda hidup mewah, ditunjukkan dengan keberadaan pelayan-pelayan pribumi di rumah-rumah mereka: "...kami memiliki beberapa pelayan, yang bertugas membawa beberapa hal."<sup>17</sup>

Saya [Rodgers] bertanya apakah orang-orang muda dari kota ini mengunjungi teman-teman Nederlander mereka di kota-kota besar Sumatera Barat lainnya? Gerdy mengatakan, "Ya, kadang-kadang kami melakukan itu," dan Daniel komentar, "Jika Anda memiliki mobil." Jadi, kita punya mobil dan sopir sekaligus. Saya berkeliling, Anda tahu, sopir selalu mengantar saya ke sekolah [MULO di Padang], dan kembali ke rumah. Jadi, saya sangat, sangat dimanjakan: sangat manja!<sup>18</sup>

Beberapa suku-bangsa lain yang beruntung juga menikmati kemewahan kota ini sekalipun sedikit sekali jumlahnya. "Tak hanya orang Tionghoa, Orang Jawa, Sunda, Minang, juga

<sup>16</sup> Susan Rodgers, "A Nederlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra...", h. 99-100

<sup>17</sup> Susan Rodgers, "A Nederlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra...", h. 99-100

<sup>18</sup> Susan Rodgers, "A Nederlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra...", h. 104

pernah hidup makmur di sini,” sebagaimana dicatatkan Fatris MF dengan sedikit berlebihan.<sup>19</sup> Hanya sekitar empat dekade sejak Sawahlunto ‘dibuka’ dari keterisolasiannya, penduduknya telah mendekati angka 44.000, jauh melampaui jumlah penghuni awalnya yang diperkirakan tidak lebih dari 500 orang pribumi.

Namun, kemundurannya mulai terasa pada awal 1930an, ketika krisis ekonomi dunia, yang dikenal luas sebagai *Malaise* memukul jatuh ekonomi banyak negara, termasuk negara dunia ketiga seperti Indonesia. Sempat bangkit sebentar pada akhir 1930an, tapi lalu setelah itu, Perang Pasifik dan berbagai peristiwa politik yang datang silih berganti seiring dengan itu telah menyebabkan kota ini sulit mencapai kemakmurannya seperti sedia kala. Pertanyaan pentingnya adalah: Bagaimana depresi ekonomi dan gejolak-gejolak politik di tingkat global memengaruhi sebuah kota di tingkat lokal, dalam hal ini Kota Sawahlunto? Pembicaraan terentang cukup panjang, berkisar masa kurang-lebih dua dasawarsa, sejak awal 1930an hingga akhir 1940an.

## METODE PENELITIAN

Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penyusunan yang dikenal pada umumnya dalam metode penyusunan sejarah modern yaitu meliputi empat tahapan:<sup>20</sup> heuristik berupa pengumpulan bahan/sumber, kritik sumber berupa kritik intern-ekstern, interpretasi, dan penulisan dalam bentuk historiografi. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Untuk penelitian ini, sumber-sumber

dikumpulkan dari berbagai tempat dan kriteria. Tahapan kedua adalah kritik sumber, yang dapat dibagi atas kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari otentisitas arsip dan dokumen yang sudah didapatkan. Sedangkan kritik intern dilakukan terhadap isi dokumen yang otentik tersebut untuk mendapat kevalidan data yang dikandungnya. Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis data. Fakta yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan analisis prosedural dan struktural.<sup>21</sup> Analisis prosedural digunakan guna menyusun perkembangan Sawahlunto sebagai sebuah kota. Sementara analisis struktural digunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan kota ini dalam masa kemerosotan. Tahap berikutnya adalah tahap penulisan dalam bentuk karya historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Topografi

Kota Sawahlunto, yang terletak di pedalaman Minangkabau (Sumatera Barat), dikenal luas sebagai kota kuali. Hal ini disebabkan oleh topografi kota yang berceruk serupa perkakas memasak itu. Permukiman penduduk terletak pada dasar kuali itu. Sementara di sekelilingnya, perbukitan dengan tebing-tebing terjal yang [dulu] sulit ditembus melingkarinya. Bukit-bukit yang umumnya mengandung batubaru. “...Seperti sebuah baskom, sekelilingnya dibatasi oleh dinding yang terjal. Sebagai dasarnya adalah Kota Sawahlunto. Dinding-dinding pembatas Kota Sawahlunto pada umumnya berbentuk bukit-bukit yang terjal sehingga kota ini berada pada daerah yang curam atau di dasar lembah.”<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Fatris MF. *Merobek Sumatra...*, h. 27

<sup>20</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993); Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Bandung: Tiara Wacana, 2003); Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Penerjemah Nugroho Notosusanto. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985).

<sup>21</sup> Lihat juga: Christoper Lloyd, *The Structure of History*, (Cambridge: Blackwell, 1993); Gilbert J. Garaghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1984).

<sup>22</sup> Zaiyardam Zubir, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai. Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-*

*Aneka Minang* pada tahun 1972 menyebut kota itu "nampak bagai lengkungan perut kuali yang terpuruk".<sup>23</sup> Sementara seorang Indo-Belanda, Gerdi Ungerer, jauh sebelumnya, pada 1930, menyebutnya kota itu "like a cup, with mountains around it"-seperti sebuah cawan, dengan gunung-gunung menyitarinya.<sup>24</sup> Sawahlunto dalam pandangannya adalah "The town being in a valley,"-kota yang ada pada sebuah lembah. Adapun kebanyakan orang Belanda menyebut Sawahlunto dengan "Lunto Kloof" karena terletak disebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi topografisnya yang demikian itu direkam dalam sebuah potret yang dibuat oleh Ir. Th. Fa. Delprat sebelum daerah itu berkembang menjadi sebuah kota tambang. Potret itu memperlihatkan hamparan areal persawahan dan sebuah sungai yang mengalir berliku dengan latar belakang perbukitan.

Melihat letaknya secara keseluruhan, memang kota itu berada pada sebuah lembah yang seolah-olah terkurung. Namun demikian, sebagaimana dicatatkan Zaiyardam, pada beberapa wilayah terdapat tempat yang agak landai, terutama yang dilalui Sungai Lunto. Lewat jalur itulah penduduk-penduduk nagari di pinggirannya memasuki lembah tersebut untuk mengembangkan areal persawahan dan perladangan. Dan di bagian yang agak landai itu pula, pemerintah kolonial membangun permukiman buruh tambang pada akhir abad ke-19. "Di pinggir sungai itulah terbentuknya permukiman buruh

tambang batubara," catat Zaiyardam lagi.<sup>25</sup>

Sebelah utara kota itu dibatasi oleh tanggul atau gang dari *kwarsporpier* yang diakhiri lapisan curam yang mempunyai tingkat kemiringan 60 derajat ke arah selatan. Di arah selatan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Semakin ke selatan, konturnya semakin landai, terutama menuju Sungai Ombilin dengan tingkat kemiringan 15-20 derajat. Masih ke arah selatan, dari areal ladang batu bara terdapat lapisan-lapisan yang cenderung miring ke timur laut menuju areal pertambangan Sungai Durian dengan tingkat kemiringan 25-30 derajat. Pada bagian selatan sampai pada *Groenstenen* itulah, lapisan batubara terdapat pada tebing yang terjal.<sup>26</sup> Kandungan batubara itulah yang telah menyulap kota itu menjadi kota ramai dan makmur hingga 1930an, namun setelah itu mengalami keguncangan yang berarti akibat krisis ekonomi dunia.

## 2. Masa *Malaise*

Pada tahun 1930, krisis ekonomi melanda hampir seluruh dunia. Krisis ini bermula di Eropa, tapi berimbas nyaris ke seluruh dunia. Masa *malaise*, begitu periode itu sering disebut, disebabkan karena kemerosotan harga bahan mentah di pasaran dunia. Imbasnya, dengan telak kemerosotan itu turut memukul-jatuh ekonomi Hindia Belanda yang memang dihidupi oleh produksi bahan mentah atau komoditas-komoditas pertanian-perkebunan. 'Masa meleset'-demikian masa itu sering disebut-menyebabkan di beberapa daerah penting seperti di Sumatera Timur yang tersohor karena perkebunannya, sebagaimana dicatatkan William Joseph O'Malley, "penderitaan orang-orang pribumi tidak tertahankan lagi." Di Yogyakarta, yang tidak

1927, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 78-79

<sup>23</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

<sup>24</sup> Susan Rodgers, "A Netherlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra from Sawahlunto to Bangkinang internment camp", *Indonesia*, 79, April 2005, h. 101

<sup>25</sup> Zaiyardam, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai...*, h. 78

<sup>26</sup> Zaiyardam, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai...*, h. 79

sepenuhnya bergantung pada kerkebunan, *malaise* telah menghancurkan kejayaan usaha kerajinan batik dan menyempitkan perkebunan tebu (1994: 141-146). Sementara di basis-basis karet seperti di Jambi, Palembang, dan Sumatera Utara, kejatuhan harga karet akibat *malaise* berimbas pada menurunnya gairah produksi, kebun-kebun karet ditinggalkan tanpa terawat, dan masyarakat petani/pekebun dilanda demam sosial.

Sementara di Sumatera Barat, yang mengandalkan komoditi seperti kopi, gambir, teh, dan tembakau, akibat yang ditimbulkan depresi ekonomi ini juga tampak signifikan. Harga komoditi itu anjlok, sehingga pendapatan masyarakat petani juga anjlok. Bukan saja melemahkan gairah produksi perkebunan dan pertanian di kawasan-kawasan pedesaan, tetapi juga melemahkan gairah dagang di kota-kotanya yang memang dihidupi oleh gairah perdagangan dengan pedalaman. Di Padang, misalnya, pengangguran merebak hebat dan orang miskin bertambah banyak. Keadaan ini memaksa pemerintah pusat di Batavia pada tahun 1936 mengeluarkan cara-cara untuk menanggulangi akibat lebih jauh dari kehancuran ekonomi masyarakat. Sebuah peraturan pemerintah tentang Penanganan Orang-orang Miskin di Kota Padang (*Armenzorgverordening Gemeente Padang*) dikeluarkan. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa kebijakan politik saja sudah tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan, sehingga dirasa perlu untuk menyelenggarakan dan meningkatkan bantuan terhadap orang miskin. Sebuah komisi dibentuk, Komisi untuk Kemiskinan (*de Commissie voor de Armenzorg*), demikian ia disebut, diketuai oleh Walikota Padang secara langsung (ANRI, No. 1514).

Di tengah depresi ekonomi yang melanda dunia itu, juga berimplikasi langsung kepada Sawahlunto sebagai kota yang dihidupi hasil tambang. Pada

awalnya, *malaise* tidak memberi dampak pada TBO secara langsung, tetapi belakangan imbasnya semakin pasti. Perusahaan batubara swasta, Tambang Batubara Pulau Laut, misalnya telah ditutup akibat imbas krisis. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu juga telah berencana menutup perlahan-lahan Tambang Batubara Ombilin karena biaya operasional tambang bawah tanah yang mahal. Rencana penutupan ini segera mendapat reaksi dari banyak orang, bukan saja dari pekerja tambang, melainkan juga memancing reaksi berbagai kelompok di Sawahlunto, Bukittinggi, Padang Panjang dan Padang.

Direktur TBO, W. Holleman berupaya menggalang konsolidasi, salah satunya mengadakan rapat yang digelar pada tanggal 9 September 1934. Rapat ini dihadiri pedagang-pedagang Cina, Indo-Eropa, pejabat-pejabat Belanda dan pribumi, tokoh-tokoh masyarakat adat dan kelompok para jurnalis, yang mendesak supaya pemerintah memikirkan kembali rencana penutupan TBO. Pada pertemuan itu dibahas mengenai pentingnya tambang Ombilin dari perspektif ekonomi daerah. Jika tambang ditutup akan berdampak pada pabrik semen Indarung, kereta api Sumatra, industri kecil, dan konsumen batubara Ombilin akan kehilangan pasokan. Surat protes dikirim kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Akibat protes itu, rencana penutupan TBO itu akhirnya tidak jadi direalisasikan pemerintah Belanda TBO memang tidak jadi ditutup, namun Holleman terpaksa harus mengambil langkah-langkah penyelamatan untuk menghindarkan perusahaan dari amuk krisis. Pada 1935 keluar kebijakan-kebijakannya berupa: sebagian tenaga kerja diberhentikan, sejumlah fungsi dikurangi, dan memotong 25% gaji personil dalam satu tahun. Implikasinya terhadap produksi perusahaan tampak signifikan: produksi terjun bebas dari 835.321 pada tahun 1934 menjadi 376.684 ton pada tahun

1935 (*Sinar Sumatra*, 27-11-1934; 28-11-1934)

Ketika perusahaan tambang batubara yang menghidupi Sawahlunto mengalami masa yang sulit, maka imbasnya adalah tidak ada pembangunan fisik yang berarti pada kota ini. Perusahaan hanya membangun Kamar Kereta (1931), Tangsi P.K.I.S (1940). Rumah W.125 (1941), sekolah dan gereja ST. Lucia. Sementara bangunan-bangunan dalam kota tidak terlihat bertambah. Jalan raya pun tidak bertambah pada masa lesu ini. Selain hal yang tersebut itu, tidak tercatat lagi pembangunan yang berarti atas kota itu. Dapat dikatakan, kota ini pun turut mandeg pertumbuhannya pada kurun tersebut. Sekalipun sempat mendapat angin kebangkitan menjelang akhir 1930an dengan ditunjukkan oleh naiknya produksi batubara, tetapi keadaan itu segera dipukul lagi oleh perkembangan baru di dunia, di mana Perang Pasifik terjadi di utara Hindia, yang menimbulkan perubahan peta politik di kawasan.

### 3. Perang Pasifik

Perang Pasifik mulai ditabuh di atas Samudra Pasifik pada dekade akhir dari paro pertama abad ke-20. Pemicunya adalah negara militer Asia yang sedang menikmati kebangkitan dan superioritasnya, Jepang. Setelah serangan mematikan terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbour, Hawaii, pemerintah militer Jepang memulai rentetan invasinya ke Asia, termasuk mengambil-alih Indonesia dari Belanda. Armada ke-23 Jepang mendarat pada 13 Maret 1942 di Sumatera Barat dan pada tanggal 17 Maret 1942 Kota Sawahlunto sudah diduduki tanpa perlawanan. Pengambil-alihan dan pendudukan Sawahlunto jelas penting mengingat kota tersebut adalah kota tambang yang di rahimnya beratus ribu berton-ton batubara dapat dihasilkan. Hal ini terbukti benar ketika pemerintahan Jepang menjadikan Kota Sawahlunto sebagai ibukota dari

Kabupaten Solok, yang memungkinkan Bung Tsu Tjo-nya (Bupati) berkedudukan di kota itu.

Pengambil-alihan Sawahlunto secara langsung juga berarti pengambil-alihan perusahaan tambang batubara. Pengambil-alihan itu berlangsung dengan cepat, oleh penguasa militer Jepang dari tangan pemerintah kolonial Belanda yang sudah kalah-menyerah. Pegawai-pegawai Belanda yang menduduki posisi-posisi penting maupun tidak penting dalam perusahaan secara otomatis tersingkir sama sekali. Banyak di antara mereka yang ditangkap militer Jepang kemudian dikirim ke kamp-kamp kerja paksa yang terbentang hingga ke Bangkinang ke arah timur sana. Sedikit di antaranya yang berhasil selamat dari neraka kamp, setelah lebih dulu melarikan diri sebelum armada Jepang menguasai kota itu.<sup>27</sup>

Kepemimpinan atas kota itu secara penuh berada di bawah kendali Jepang sebagai penguasa baru. Penjajah Jepang mendidik penduduk lokal untuk membantu dalam pertambangan batubara. Sebagian besar teknologi berasal dari Jepang, yang mengharuskan penduduk lokal untuk belajar bahasa Jepang. Di bawah Jepang, perusahaantambang tidak terlalu banyak melakukan inovasi dalam teknologi tambang dan organisasi kerja. Mereka terus memanfaatkan alat-alat tambang yang telah ada sejak zaman Belanda. Hanya ada beberapa infrakstruktur yang bertambah pada masa Jepang, antara lain, satu mesin listrik berkekuatan 2000 KVa, yang dipergunakan untuk sentral listrik Padang, "Gebr. Stork Hengelo" yang dibawa dari Pulau Bangka (*Haluan*, 22-6-1953).

Di perusahaan, jumlah staf Jepang yang bekerja hanya 20 orang. Mereka menduduki jabatan-jabatan penting di kantor pusat dan bertindak sebagai pengawas bengkel, pusat

<sup>27</sup> Susan Rodgers, "A Netherlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra... h. 117

pembangkit listrik, serta di tambang. Untuk mengatasi minimnya tenaga kerja, pimpinan perusahaan mengerahkan tenaga staf Eropa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti di rumah sakit sampai tahun 1943. Setelah itu, posisi mereka diambil alih oleh orang-orang Jepang dan pribumi. Sehingga data pada tahun 1944 menunjukkan, bahwa pada tahun 1942-1944, pimpinan perusahaan mengerahkan 2.533 orang buruh untuk mengeksploitasi batubara. Bila dibandingkan masa akhir kolonial Belanda, di mana produksi batubara mencapai 537.733 ton, namun memasuki masa awal pendudukan Jepang produksi terjun bebas menjadi 228.724 ton. Memasuki tahun 1943 produksi batubara semakin menurun, bahkan sampai kurang separohnya, yakni 92.878 ton. Angka-angka produksi itu, bukannya stagnan, malah turun lagi menjadi 72.780 ton tahun 1944. Pada masa akhir pengelolaan oleh *Hokaido Tanko Kisen Kabushiki Kalaha*, produksi jatuh, hanya 50.324 ton pada tahun 1945.

Di tengah kondisi demikian, perekonomian kota otomatis menjadi lesu karena seluruh keuntungan dari komoditas batubara dikuasai Jepang. Hal ini menyebabkan kondisi fasilitas kota menjadi rusak karena tidak adanya biaya perbaikan dan pemeliharaan. Alih-alih kemajuan dan pertumbuhan, bahkan dapat dikatakan kota itu justru mengalami kemunduran yang berarti. Beberapa bangunan kota dibumihanguskan Belanda sebelum Jepang tiba. Sampai periode Jepang berakhir, tidak tercatat bangunan-bangunan sisi kota yang berarti yang dibangun kembali. Perusahaan di bawah Jepang hanya memperbaiki/memperbaharui alat-alat yang rusak semasa perang: jembatan arang, gudang arang, rumah transformator, kran, dan timbangan arang untuk kepentingan jangka pendek mereka sendiri.

Kehidupan warga kota pun menjadi sulit karena perekonomian kota

itu jatuh, dan tidak ada arus uang yang berputar di kalangan penduduk lokal. Sementara itu, kesengsaraan juga tampak berarti di tataran para buruh. Banyak pekerja bebas dan kuli kontrak dan kuli bebas, karena perlakuan kasar Jepang, berhenti bekerja atau melarikan diri. Jika di bawah pemerintah kolonial mereka menerima gaji, namun bekerja di bawah kuasa Jepang lebih mirip seperti bekerja di kamp-kamp kerja paksa; mereka lebih mirip orang rantai ketimbang buruh merdeka. Mereka bekerja mengeruk batubara, tetapi nyaris tidak mendapat bayaran sama sekali.

Hal ini tentu secara langsung berimplikasi pada keadaan kota; setelah kota ini kehilangan banyak orang Eropa karena dikirim ke kamp-kamp kerja paksa, Sawahlunto juga kehilangan penduduk pribumi yang melarikan diri. Banyak daerah-daerah di pinggiran Sawahlunto menarik penduduknya kembali. Kolok, misalnya, yang sebelumnya menyumbang jumlah pekerja TBO yang signifikan, pada periode ini sama sekali tidak seorang pun yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Tidak saja itu, nagari-nagari di pinggirannya juga lengang, laki-laki mengungsi membawa istri mereka ke hutan-hutan yang dianggap relatif aman dari pengawasan Jepang. Laki-laki mengungsi karena dijaring razia militer Jepang untuk dikirim menjadi romusa ke kamp-kamp kerja paksa, sementara perempuan khawatir akan diperkosa.<sup>28</sup>

### **EPILOG: Kemerostan yang Terus Berlanjut**

Kaum Republik merebut Sawahlunto dari penguasaan Jepang segera setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan di Sumatera Tengah. Kota ini memiliki arti penting bagi

<sup>28</sup> Deddy Arsyah, "Kolok Mudiak pada Masa Tambang Rakyat: Tinjauan Pengaruh Dunia Tambang terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedesaan-Pinggiran Sawahlunto" *Jurnal Tsaqafi*, Vol. 1 No. 2, tahun 2009. h. 33-34

pergerakan kemerdekaan karena menjadi pusat perakitan senjata kaum Republik, lokasinya berada di pabrik tambang batubara Ombilin.<sup>29</sup> Setelah Indonesia merdeka, aktifitas tambang diteruskan pemerintah Indonesia lewat perpanjangan tangan perusahaan tambang negara. Pada tahun 1950an, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan maupun perkebunan milik Belanda secara besar-besaran. Perusahaan tambang batubara Sawahlunto adalah salah satu yang dinasionalisasi, dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Republik. Namun, berbeda dengan banyak perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda lainnya, nasionalisasi TBO tidak memakan waktu yang panjang, bahkan menurut Zaiyardam, hampir-hampir tidak ada proses nasionalisasi karena perusahaan tambang ini segera diambil-alih kaum Republikan segera setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan.<sup>30</sup>

Setelah secara penuh dikuasai pemerintah Republik Indonesia, perusahaan perlahan-lahan mulai meningkatkan produksinya kembali. Pekerja ditambah, perekrutan pegawai dibuka luas, upah dinaikkan, dan perlakuan kasar mandor dihapuskan. Namun gejolak politik yang terjadi pada dekade 1950an menjadikan usaha itu tampak sia-sia, hal ini terkait erat dengan perang saudara yang meletus sepanjang tahun 1958-1961, yang dikenal sebagai Pemberontakan PRRI, yang secara langsung turut berimbas kepada kegiatan tambang. Selama rentang waktu itu kegiatan produksi dapat dipastikan terganggu sehingga produksi mengalami penurunan drastis. Apalagi, tidak lama berselang, pada

1965, gejolak besar lainnya meletus, mula-mula di Jakarta, lalu imbas politiknya kemudian juga dirasakan bahkan di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan Republik itu. Gerakan 30 September, sebuah kudeta yang gagal, yang diduga didalangi Partai Komunis Indonesia telah menyeret partai terbesar ke-4 dalam pemilu 1955 itu ke dalam arus kehancuran total. PKI secara resmi dilarang dan pembersihan terhadapnya dimulai di seantero negeri. Pemerintah militer yang berkuasa pasca-Gerakan juga mulai membersihkan Sawahlunto dan perusahaan tambang kota itu dari kaum komunis, melarang setiap perkumpulan pekerja, mematikan organisasi buruh yang pernah ada, dan mereka yang terlibat dengan PKI diberhentikan, dikirim ke penjara, atau dibunuh.

Gejolak politik yang terjadi di kota itu berturut-turut telah turut membawa pengaruh nyata ke dalam tubuh perusahaan, atau dapat dikatakan gejolak politik di tataran perusahaan tambang merepresentasikan gejolak di kota itu juga. Gejolak-gejolak politik tiga dekade itu telah mengantarkan Sawahlunto dalam kemerosotan seiring dengan kemerosotan produksi batubara, bahkan hingga akhir 1960an, kemerosotan itu semakin terasa dengan ditandai oleh jumlah penduduk yang jauh menurun, hanya sebanyak 11.957 orang pada cacah jiwa tahun 1970.<sup>31</sup> Di antara 6 kota yang mendapat status kotamadya di Sumatera Barat inilah kota kotamadya yang terkecil, sekailpun terdiri dari berbagai suku bangsa: Jawa, Madura, Ambon, Nias, Sunda, Aceh, Batak, dan sebagainya.<sup>32</sup> Pada periode ini, Sawahlunto hanya disebut sebagai kota kecil “yang apa adanya”.<sup>33</sup> Terma

<sup>29</sup> Gede Budi Suprayoga, "Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan...", h. 4

<sup>30</sup> Zaiyardam Zubir, "Nasionalisasi atau Bukan, Apa Bedanya?: Studi tentang Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat Pascakolonial", (Makalah Workshop on the economic side of decolonization, Yogyakarta 19-21 Agustus 2004) h. 15-16

<sup>31</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

<sup>32</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

<sup>33</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

ini mengindikasikan betapa telah jatuhnya pamor kota ini. "Ekonomi Kota Sawahlunto berkembang tanpa peningkatan kualitas bangunan, moda transportasi, industri, dan pekerjaan," tulis Gede Budi Suprayoga menggambarkan kemerosotan pada kurun tersebut.<sup>34</sup>

Pemerintah Kota Sawahlunto nyaris tidak dapat berbuat banyak untuk mengembalikan kota itu ke masa-masa jayanya dulu. Sheimury W.S., Walikota Kotamadya Sawahlunto pada kurun tersebut "... menggenggelengkan kepalanya dengan santai, 'Produksi Batubara menurut, dan popularitas kota ini menurun pula,' katanya," sebagaimana yang dikutip *Aneka Minang* yang terbit pada 1972. Keadaan ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung yang memindahkan ibukotanya (yang semula di Sawahlunto) ke Gambok, secara hal ini semakin membenamkan kota ini kepada kesunyian. Dengan pemindahan ini otomatis para pegawai pemerintah yang semula meramaikan kota ini juga turut berpindah ke ibukota yang baru.

*Aneka Minang* menulis:

Jalan2 kota yang tidak seberapa selalu nampak dalam keadaan sunyi senyap. Bioskop yang terdapat satu2nya di sana, sering tidak main karena kekuarangan penonton. Palagi sejak Ibu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung yang semula di sana dipindahkan ke Gambok, maka dengan boyongnya pegawai2 tingkat Kabupaten maka Kota yang terpuruk itu bertambah terpuruk.

Laporan *Anek Minang* nampak muram mengenai kota ini: "Berbicara tentang pembangunan memang nampak sansai." Sekalipun majalah yang sama juga melaporkan bahwa beberapa peremajaan atas kota itu juga ada dilakukan, namun dengan satire laporan itu juga berujar: "... beberapa perbaikan 'asal tidak ada' juga dilaksanakan. Seperti perbaikan jalan2, membuat

trotoar dan tempat2 rekreasi. Juga sebuah Los Baru di Pasar Baru telah dapat dimanfaatkan. Sedangkan yang dulu bernama Pasar Usang, kini telah ditukar namanya menjadi Pasar Remaja walaupun bangunan2nya masih tetap yang usang."

Nada hampir putus asa mengenai nasib Kota Sawahlunto terasa sekali dalam laporan tersebut: "... untuk merebut kembali prestasi dan reputasinya sebagai Kota Tambang nampaknya memang tidak mungkin lagi." Kesadaran ini membuat Shalmury lebih memilih mengarahkan kota itu menjadi Kota Pendidikan. "Saya sedang berusaha untuk menjadikan kota ini sebagai kota Pendidikan," katanya. Pada saat tersebut, sebuah Fakultas Sospol memang telah didirikan, dan telah pula direncanakan akan mendirikan "Sekolah2 Teknik tingkat Menengah" dan sekolah-sekolah kejuruan lainnya di Sawahluto.<sup>35</sup>

## PENUTUP

Sebagai penutup, telah dilihat bahwa Sawahlunto menikmati kejayaan dan kemakmurannya yang pesat dan cepat, tetapi akibat berbagai gejolak global, kota itu mengalami kemerosotannya. Pertama, karena krisis ekonomi yang melanda dunia, yang secara langsung berimbas pada produksi perusahaan tambang di kota itu, dan secara langsung pula berimbas pada pembangunan kota. Kedua, Perang Pasifik telah menyebabkan Hindia secara umum, dan Sawahlunto secara khusus, berada di bawah taklukan militer Jepang. Di bawah otoritas Jepang, Sawahlunto mengalami kemerosotan yang lebih parah lagi karena pemerintah yang berkuasa cenderung mengabaikan kota itu melebihi penguasa mana pun sebelum dan setelahnya. Sejauh kedua hal tersebut, kondisi lokal secara nyata telah

<sup>34</sup> Gede Budi Suprayoga, "Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan...", h. 5

<sup>35</sup> Welmar, "Perkembangan Kota Sawahlunto", *Aneka Minang*, Edisi 11, Oktober 1972

dibentuk atau setidak-tidaknya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di tataran dunia. Lalu setelah Indonesia merdeka, berbagai keadaan di tingkat nasional yang lebih berpengaruh kemudian atas kondisi Sawahlunto. Bagaimanapun, sebagaimana kata Wallerstein, dunia telah menjadi dusun global yang tidak lagi terisolir dari pengaruh dunia di luar dirinya. Sawahlunto, kota kecil terkurung perbukitan di pedalaman Minangkabau itu, telah membuktikan hal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Sawahlunto Kota Kecil yang Mandi Uang", *Mimbar Minang*, 23 Mei 2002
- Colombijn, Freek, "Perkembangan Jaringan Transportasi di Sumatera Barat dari Masa Parkolonial sampai Sekarang", dalam J. Thomas Lindbald (editor) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Colombijn, Freek, *Patches of Padang: The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*, Leiden: CNWS, 1994
- Deddy Arsyah, "Kolak Mudiak pada Masa Tambang Rakyat: Tinjauan Pengaruh Dunia Tambang terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedesaan-Pinggiran Sawahlunto" *Jurnal Tsaqafi*, Vol. 1 No. 2, tahun 2009
- Deddy Arsyah, "Penjara di Padang (1824-1942)", Tesis (S2), Padang: Pascasarjana Universitas Andalas, 2012
- Elsa Putri E. Syafril, "Diaspora Sedulur Sikep dan Kesenianya di Sawahlunto", *Jurnal Ekspresi Seni*, Vol. 16, No. 1, Juni 2014, h. 86-97
- Elsa Putri E. Syafril, *Menggali Bara, Menemu Bahasa: Bahasa Tansi, Bahasa Kreol Buruh dari Sawahlunto*, Yogyakarta: Pemerintah Kota Sawahlunto, 2011
- Erwiza Erman, dkk. *Lorong-lorong Kelam Perantaraan*, Jakarta: Verbum Publishing, 2010
- Erwiza Erman, dkk. *Orang Rantai. Dari Penjara ke Penjara*, Yogyakarta: Ombak, 2012
- Fatris MF. *Merobek Sumatera*, Jakarta: Serambi, 2015
- Garaghan, Gilbert J., *Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press, 1984.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Penterjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Gusti Asnan, "Transportation on the west coast of Sumatra in the nineteenth century" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, edisi 158, tahun 2002
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Haji Abdulkarim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Jakarta: Umminda, 1982
- Indira & Zuli, "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, *Limpapeh*, Edisi 01, Oktober 2014

- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Bandung: Tiara Wacana, 2003.
- Lloyd, Christopher, *The Structure of History*. Cambridge: Blackwell, 1993.
- Marah Rusli, *Sitti Nurbaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004
- Parada Harahap, *Dari Pantai ke Pantai. Pedjalanan ke Soematra*, Weltevraeven: Bintang Hindia, 1926)
- Rodgers, Susan, "A Netherlander woman's recollections of colonial and wartime Sumatra: from Sawahlunto to Bangkinang internment camp", *Indonesia*, 79, April 2005
- Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- Sagmun MD, *Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986
- Sandick, R. A. van, "Het laatsche hoofdstuk van de Ombilingsgestie", *De Indische Gids*, Amsterdam, 14 Jrg (1892)
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Zaiyardam Zubir, "Nasionalisasi atau Bukan, Apa Bedanya?: Studi tentang Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat Pascakolonial", Makalah Workshop on the economic side of decolonization, Yogyakarta 19-21 Agustus 2004
- Zaiyardam Zubir, "Orang Rantai, Orang Tambang, dan Orang Lobang: Studi tentang Eksploitasi Buruh Tambang Batu Bara Ombilin" dalam Edy S, Ekawati & Susanto Zuchri (Editor), *Arung Samudra: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A. B. Lopian*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Budaya UI Jakarta, 2001

